



Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Pendidikan Menurut Perspektif Hukum dan Sosiologi

Mia Amalia¹, Suci Rahma Lestari^{2*}, & Aji Mulyana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

Abstrak: Globalisasi memiliki dampak yang besar terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia, membawa perubahan baik dalam aspek positif maupun tantangan. Di satu sisi, globalisasi memperluas akses informasi dan pengetahuan melalui teknologi digital, sehingga sistem pendidikan dapat mengikuti standar internasional. Penggunaan teknologi internet memungkinkan akses terhadap sumber daya pendidikan global, mendukung fleksibilitas pembelajaran, serta meningkatkan kesempatan kolaborasi global bagi siswa dan guru. Adaptasi kurikulum pun terjadi untuk memenuhi kebutuhan global, meliputi keterampilan teknologi, bahasa asing, dan kompetensi berpikir kritis, yang mempersiapkan siswa bersaing di pasar kerja global. Namun, globalisasi juga memunculkan tantangan dalam pendidikan, termasuk ketimpangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang, serta antara wilayah urban dan rural. Selain itu, pengaruh budaya global berpotensi menggeser nilai-nilai lokal, menciptakan dilema antara mempertahankan identitas budaya dan mengikuti tren global. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang adaptif, inklusif, dan sensitif terhadap keragaman budaya sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa dampak positif globalisasi dapat dioptimalkan tanpa mengesampingkan keunikan lokal. Globalisasi menuntut adanya sistem pendidikan yang dinamis, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal.

Kata Kunci : Globalisasi, Pendidikan, Teknologi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3331>

*Correspondence: Suci Rahma Lestari

Email: suci.rahma2406@gmail.com

Received: 21-10-2024

Accepted: 21-11-2024

Published: 22-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Globalization has a great impact on education systems around the world, bringing changes in both positive aspects and challenges. On the one hand, globalization expands access to information and knowledge through digital technology, allowing education systems to follow international standards. The use of internet technology enables access to global educational resources, supports learning flexibility, and increases opportunities for global collaboration for students and teachers. Curriculum adaptation also occurs to meet global needs, including technology skills, foreign languages, and critical thinking competencies, which prepare students to compete in the global job market. However, globalization also poses challenges in education, including inequalities in access to technology between developed and developing countries, and between urban and rural areas. In addition, global cultural influences have the potential to displace local values, creating a dilemma between maintaining cultural identity and following global trends. Therefore, education policies that are adaptive, inclusive and sensitive to cultural diversity are needed to ensure that the positive impacts of globalization can be optimized without overlooking local uniqueness. Globalization demands an education system that is dynamic, technology-based, and oriented towards the development of quality human resources, while remaining rooted in local values.

Keywords: Globalization, Education, Technology

Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu proses belajar dengan cara mentransmisikan ilmu pengetahuan yang telah direncanakan untuk mengembangkan potensi, kemampuan dan kualitas setiap individu. Pendidikan dapat menjadi indikator atau tolak ukur seberapa maju suatu negara (Amini et al., 2020). Upaya dalam merealisasikan pendidikan haruslah dapat ditunjang oleh sistem pendidikan yang baik (Oo et al., 2022). Sistem pendidikan nasional saat ini tidak hanya berlaku bagi siswa maupun mahasiswa, dalam hal ini negara juga mewadahi sistem pendidikan yang digunakan sebagai pembentuk karakter atau norma-norma bagi pemerintah maupun warga negara.

Secara umum sistem pendidikan nasional dikenal sebagai wajib belajar 12 tahun. Pendidikan formal yang terdiri dari beberapa jenjang yaitu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melihat dari sistem pendidikan saat ini, pendidikan nasional di era globalisasi telah menjadi suatu keharusan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, karena melalui era globalisasi ini, interaksi semakin mudah dijangkau oleh setiap individu, hal tersebut telah memunculkan tantangan dan peluang baru bagi sektor sistem pendidikan di Indonesia. Dan pembaharuan sistem pendidikan nasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratisasi, desentralisasi, diversifikasi, integrasi, dan inovasi.

Pendidikan juga harus dapat didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik untuk memperoleh perubahan kognitif (pengetahuan), afektif (nilai dan sikap), dan psikomotor (keterampilan), (Hermawan, 2014). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Beberapa faktor-faktor dampak sistem pendidikan di era globalisasi yang dapat dilihat melalui perspektif hukum dan sosiologi yang pertama meliputi perspektif hukum pada regulasi Internasional akan memunculkan berbagai perjanjian internasional tentang pendidikan seperti konvensi mengenai hak-hak yang dapat mengatur standar minimum kualitas pendidikan (Astomo, 2021). Hal tersebut dapat mendorong negara-negara untuk memutuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan bermutu, selanjutnya pada hak kekayaan intelektual dalam era globalisasi ini dapat memicu perdebatan mengenai hak cipta atas suatu materi pendidikan seperti buku teks dan seperangkat lunak pendidikan (Sanusi, 2024). Dengan demikian hal ini akan sangat berdampak pada akses terhadap bahan pembelajaran dan inovasi dalam dunia pendidikan, dan standarisasi pendidikan juga dapat menimbulkan suatu tekanan yang dapat mencapai standar pendidikan internasional seperti PISA yang mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi kurikulum dan sistem penilaian. perspektif (Gunawan et al., 2024; Wang et al., 2023).

Faktor kedua yang dapat dilihat melalui perspektif sosiologi yaitu, tentang kesenjangan digital yang diakibatkan oleh era globalisasi sebab dapat mempercepat perkembangan teknologi informasi, namun tidak semua negara dan individu memiliki akses yang sama untuk meninjau lebih luas hal ini menciptakan kesenjangan digital dalam dunia pendidikan dan memperlebar kesenjangan sosial, kemudian terkait pluralisme budaya akan menciptakan suatu kondisi dimana interaksi nasional dan internasional seperti, antar budaya dan antar negara yang semakin intensif (Firmansyah et al., 2023). Dalam konsep pendidikan dapat memperkaya pemahaman siswa tentang keberagaman, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga identitas budaya, selanjutnya komersialisasi pendidikan artinya jasa untuk mencari pasar baru yang menjadikan pendidikan bukan lagi semata-mata hak dasar manusia melainkan sebuah produk yang masih memiliki nilai jual dan dapat menghasilkan keuntungan (Basri, 2023). Transformasi kurikulum pendidikan di era globalisasi ini perlu terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman termasuk kebutuhan pasar kerja global dan pentingnya keterampilan di era globalisasi ini, siswa perlu dilengkapi dengan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif untuk menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks (Abdul Karim et al., 2024).

Dampak faktor-faktor tersebut, pendidikan dalam perspektif hukum dan sosiologi merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi luas. Meskipun dapat membawa beberapa-beberapa dampak positif, namun tetap memiliki dampak negatif, oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi hak dasar setaip individu dan tidak dijadikan sebagai komoditas semata (Abas et al., 2023). Agar sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena pendidikan merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya. Tercantum pada Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Pemerintah negara Indonesia berkewajiban merencanakan kehidupan bangsa." Adapun pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran." Dengan demikian semua warga rakyat Menilai Indonesia seharusnya dapat mengenyam pendidikan tanpa ada diskriminasi atau memandang status sosial.

Salah satu dampak dari era globalisasi adalah merombak sistem kurikulum di Indonesia, yang telah mengalami pergantian kurikulum sebanyak 11 kali. Mulai dari kurikulum rencana Pelajaran di tahun 1947 (kurikulum lanjutan yang awalnya digunakan pada masa penjajahan Belanda), kurikulum 1952 (Rentjatna), kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006 (KTSP), kurikulum 2013 (K-13) dan kurikulum 2021 (Kurikulum Merdeka), (Anis Aprianti & Siti Tiara Maulia, 2023). Dengan mengetahui pembaharuan-pembaharuan pergantian kurikulum tersebut, kasus yang dapat ditanda bawahi saat ini yaitu mengenai "Isu ganti kurikulum, Kemendikbud ungkap Nasib kurikulum Merdeka." Merujuk pada situs web Kemendikbud, sudah ada 309.149 sekolah terdaftar sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2023 (A, 2024). Sebanyak 6.200 sekolah di antaranya ada di daerah tertinggal yang menyebabkan terjadinya standarisasi dan distandarisasi yang kaku untuk mencapai efisiensi lalu mengabaikan suatu keberagaman kebutuhan peserta didik, serta

komersialisasi pengetahuan dan informasi di komoditas, sehingga akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi terbatas bagi sebagian masyarakat. Dan mengakibatkan kesenjangan dalam sistem pendidikan di Indonesia (Aripin, 2021).

Berdasarkan berita yang beredar saat ini hanya sekitar 27% sekolah atau satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum tersebut (Noprizal, 2024). Kurikulum Merdeka ini memiliki fokus pada materi esensial, fleksibel atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa serta fokus pada penguatan karakter. Namun hal yang menjadi tantangan ketika kurikulum ini ditetapkan adalah penggunaan teknologi (memanfaatkan platform pembelajaran, email, hybrid learning, e-learning, sumber dan media pembelajaran berbasis digital) dan memunculkan pembelajaran terdiferensiasi. Hal ini sangat membutuhkan kesiapan bagi siswa, khususnya guru dalam menyiapkan suatu strategi sebelum berlangsungnya program pembelajaran. Dalam implementasinya, kurikulum ini kurang baik karena telah membebani siswa dan guru, sangat mewart dan mahal. Maka dalam penerapan kurikulum tersebut membutuhkan sarana dan prasarana yang merupakan alat atau pendukung dalam berlangsungnya proses belajar pada era globalisasi ini, sosioalisasi, dukungan pemerintah serta keikutsertaan siswa untuk melangsungkan keberlangsungan kurikulum Merdeka (Fitri, 2021; Subroto et al., 2023).

Globalisasi dan pendidikan telah menjadi suatu interaksi yang tidak dapat dihindari dan terpisahkan (Nanti & Fadriati, 2023). Dengan terus berkembangnya perubahan zaman yang diikuti oleh era globalisasi, secara berperan aktif telah mengubah lanskap pendidikan secara drastis. Interaksi yang semakin luas menciptakan sebuah "desa global" di mana jarak dan batas seolah-olah semakin tipis. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih intens dan beragam antar setiap individu, kelompok, dan negara. Pembangunan sistem pendidikan nasional dalam era globalisasi merupakan proses yang harus terus berlangsung mengingat kesadaran dalam membenahi pendidikan nasional semakin mendesak, maka perlunya kesadaran bahwa pendidikan merupakan suatu komponen penting dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat bagi masa depan bangsa ini. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Sebagai mana menurut, (Basri, 2023) berjudul "Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Pendidikan: Perspektif Sosiologi Pendidikan" Penelitian ini berfokus kepada sudut pandang sosiologi pendidikan yang memiliki persamaan dengan yang saat ini peneliti teliti, terkait bagaimana globalisasi telah menciptakan peluang dan kesulitan yang mempengaruhi sistem pendidikan secara signifikan melalui perubahan kurikulum yang diharapkan dapat lebih inklusif dan relevan dengan dunia secara keseluruhan, mobilitas siswa guna untuk memahami karakterisasi pola perilaku sosial yang meliputi tiga komponen penting (faktor sosial-budaya, faktor situasional, faktor kepribadian), pengaruh teknologi yang dapat menjadi respon dan preferensi siswa serta guru akan terus mengevaluasi kelas dan menyesuaikan strategi pengajaran akibat perubahan dan kemajuan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pendidikan multikultural dan inklusif yang berarti seluruh gagasan dari semua kelompok nasional dan budaya yang berbeda

memiliki hak untuk mengikuti jalur pengembangan mereka sendiri dan memiliki kegiatan, nilai-nilai, dan norma mereka sendiri berpikir kritis dan memikirkan bagaimana kurikulum dapat mewakili keragaman siswa yang diperlukan untuk menciptakan kurikulum yang responsif secara budaya.

Menurut, (Astomo, 2021) "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi". Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pendidikan yang menjadi faktor utama karena tuntutan globalisasi dan memiliki persamaan dengan yang peneliti teliti saat ini. Penelitian ini memiliki fokus terhadap pemerintah dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berbasis pada sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 yang responsif di era globalisasi dalam pembangunan hukum di bidang pendidikan. Dengan penelitian ini menunjukkan bahwa peran politik hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional adalah kebijakan resmi negara untuk membentuk hukum dan menerapkannya dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan.

Selanjutnya menurut (Khudlori, 2022) "Sekolah dan Masyarakat Dalam Mengembangkan Pendidikan Di Era Globalisasi" penelitian ini memiliki keterkaitan dengan yang peneliti teliti terkait konteks pendidikan di era globalisasi, namun penelitian ini lebih menekankan pada peran aktif sekolah dan masyarakat mengenai sekolah maupun masyarakat mempunyai peran sendiri-sendiri dalam pendidikan, lalu mempunyai peran yang sama-sama penting dan kontribusi besar dalam Pendidikan. Melalui penelitian-penelitian ini, penelitian yang peneliti teliti dapat menjadi pelengkap bagi pendidikan di era globalisasi ini. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pendidikan meliputi dampak, kolaborasi anatara berbagai aktor seperti sekolah, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas.

Adapun tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen dalam mata kuliah dan diharapkan bagi diri pribadi dapat menambah wawasan pengetahuan yang mendalam terhadap dampak globalisasi dalam dunia pendidikan yang sedang berlangsung saat ini, serta diharapkan masyarakat akan lebih memahami tentang pentingnya pendidikan bagi setiap individu terhadap dampak globalisasi yang memiliki implikasi luas, sehingga hal yang menunjang kegiatan positif terhadap pendidikan dapat direalisasikan semakin lebih baik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif untuk memberikan suatu gambaran yang mendalam dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan dua perspektif yang berbeda, yaitu hukum untuk menganalisis regulasi pendidikan dan sosiologi untuk memahami perubahan sosial dalam sistem pendidikan yang disebabkan oleh globalisasi sebagaimana dampak globalisasi dapat memengaruhi sistem pendidikan. Peneliti akan mengidentifikasi data sekunder yang dikumpulkan melalui sumber yang telah ada atau publikasi sebelumnya dengan studi pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen resmi dari lembaga

atau institusi yang terkait seperti undang-undang pendidikan atau referensi lain yang relevan terhadap topik penelitian ini. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, diharapkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti menjadi lebih luas dan mendalam sehingga tidak hanya memperkaya pemahaman akademis tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi pembaca atau pihak yang terlibat, untuk memahami konteks tertentu dengan cara yang lebih holistic dan relevan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan adalah suatu proses dimana setiap individu belajar tentang hal-hal baru yang dapat mereka terus kembangkan secara aktif untuk meningkatkan potensi diri, karena pendidikan mampu memberikan suatu dampak besar bagi manusia untuk dapat bertahan hidup dan menjadi suatu pedoman baik apabila dilakukan dengan positif. Dalam kehidupan, pendidikan telah menjadi penopang utama yang sangat penting, oleh karena itu pendidikan haruslah mendapatkan perhatian dari berbagai sektor baik pemerintah maupun masyarakat yang ikut berkontribusi di dalamnya. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menggariskan, bahwa pendidikan dilaksanakan melalui satu sistem pendidikan nasional yang mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Indonesia, 1989), (Gusti & Masduki, 2022). Dan dalam UU No. 20 Tahun 2013 sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1 ayat 3 adalah mengenai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai pendidikan nasional. Serta dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sampai saat ini masih digunakan sebagai pijakan dan instrument yang sah dalam membuat kebijakan Pendidikan di Indonesia.

Adapun seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar dan sistem pendidikan, dan anggaran pendidikan nasional. yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu hak wajib bagi setiap warga negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Negara harus dapat menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi warga negaranya. Dengan dibangunnya pendidikan bagi warga negara, maka selain melaksanakan kewajibannya secara tidak langsung negara juga menanamkan investasi pada modal manusia. Masyarakat yang berpendidikan mempunyai produktivitas yang lebih baik daripada yang kurang berpendidikan, Peran serta masyarakat sangat penting bagi kemajuan negara (Juliannisa et al., 2022).

Globalisasi dan pendidikan telah menjadi suatu interaksi yang tidak dapat dihindari dan terpisahkan. Dengan terus berkembangnya perubahan zaman yang diikuti oleh era globalisasi, secara berperan aktif telah mengubah lanskap pendidikan secara drastis.

Interaksi yang semakin luas menciptakan sebuah “desa global” di mana jarak dan batas seolah-olah semakin tipis. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih intens dan beragam antar setiap individu, kelompok, dan negara. Memperhatikan hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan teknologi saat ini telah semakin berkembang pesat. Sehingga pendidikan sangatlah penting bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Untuk menghadapi era globalisasi ini, peran pendidikan nasional harus mampu meningkatkan suatu mutu pendidikan baik secara akademik maupun non-akademik dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan (Salim, 2014).

Peran teknologi bagi pendidikan nyatanya dapat meningkatkan produktivitas yang dapat mempercepat laju tahap belajar, dengan berbagai perangkat dan platform digital, teknologi memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses informasi secara cepat mulai dari artikel ilmiah, video pembelajaran, hingga kursus daring, hal ini akan sangat membantu memperdalam materi yang mungkin tidak dibahas secara mendalam saat menempuh pendidikan formal dan membuka kesempatan untuk memperkaya materi pembelajaran, lalu dalam mengelola materi dan data pembelajaran akan lebih efisien serta akan terwujudnya pengalaman belajar yang lebih interaktif. Sekaligus menyiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan keterampilan digital di masa depan.

Pendidikan wajib harus dapat tertanam dengan baik dan menyeluruh pada setiap lapisan Masyarakat demi menghasilkan SDM yang berkualitas dan berinovatif bagi setiap kalangan individu dan guna menciptakan Masyarakat yang berpengetahuan dan memiliki daya saing tinggi. Dapat diperhatikan mulai dari pendidikan formal maupun non-formalnya, agar terwujudnya pendidikan sepanjang hayat, dimana, kapan dan oleh siapa saja tanpa batasan usia dengan konteks dan kebutuhannya (Salsabila et al., 2021). Pendidikan formal yang terdiri dari beberapa jenjang yaitu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan memastikan bahwa Pendidikan formal dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan Masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil dengan hal itu dapat berdampak baik dan positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan.

Menilik pada ekapitulasi data pokok pendidikan nasional semester 2023/2024 ganjil dan genap :

1. Semester Ganjil

	Sekolah	Peserta Didik	Rombel	Guru	Tendik	Jumlah Kirim	% Kirim
PAUD	203,596	6.882.224	470,163	486,451	223,504	197,465	97%
PKBM &SKB	10,596	1.828.486	'85.950	44,705	12,937	9,676	91%
SD	149,344	24.045.235	1.144.012	1.479.196	335,719	148,999	100%
SMP	43,025	9.957.429	350,578	674,67	182,082	42,652	99%
SMA	14,595	5.300.042	171,478	341,316	95,519	14,469	99%
SMK	14,445	5.040.123	187,335	325,747	95,519	14,264	99%
SLB	2,332	158,638	38,109	27,024	8,101	2,314	99%
Total	437,722	53.212.177	2.447.625	3.379.109	948,575	429,839	98%

2. Semester Genap

	Sekolah	Peserta Didik	Rombel	Guru	Tendik	Jumlah Kirim	% Kirim
PAUD	204,217	6.551.472	456,38	485,994	227,994	188,274	92%
PKBM &SKB	10,781	1.933.707	92,189	46,986	13,970	9,498	88%
SD	149,422	24.007.422	1.143.949	1.490.798	344,064	148,787	100%
SMP	43,244	9.911.821	350,288	678,09	183,521	42,661	99%
SMA	14.690	5.271.944	171,414	343,698	96,198	14,497	99%
SMK	14.470	4.982.768	186,818	325,489	91,231	14,188	98%
SLB	2,344	158,664	38,646	27,123	8,426	2,323	99%
Total	439,168	52.927.798	2.439.684	3.398.178	964,929	420,228	96%

Menurut (Kemendikbudristek, 2024), Wajah Pendidikan pada statistik data rekap nasional semester ganjil dan genap tahun 2023/2024, diketahui pada semester ganjil terdapat sejumlah 437.722 sekolah yang tersebar di Indonesia dengan jumlah peserta didik yang mencapai hingga 53.212.177. Diikuti oleh jumlah sekolah pada semester genap mencapai 439.168 dan jumlah peserta didik yang mencapai hingga 52.972.798 meliputi jenjang pendidikan mencakup PAUD, PKBM & SKB, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Melihat pada perkembangan statistik dua data rekap nasional tersebut, secara nominal semester genap memiliki kenaikan jumlah jika dibandingkan dengan data jumlah sekolah pada semester ganjil pada tahun 2023/2024 dengan jumlah sekolah yang meningkat hingga 1.446 sekolah.

Data selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah peserta didik pada semester ganjil tahun 2023/2024 memiliki 53.212.177 peserta didik yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan peserta didik pada semester genap yaitu mencapai 52.927.798 hal ini membuktikan bahwa adanya suatu penurunan hingga 284.379 peserta didik. Penurunan jumlah peserta didik, baik dalam suatu pendidikan formal atau non-formal di era globalisasi ini dapat menjadi suatu tantangan yang membawa dampak signifikan bagi

berbagai aspek baik dalam aspek pendidikan itu sendiri, sosial, ekomi dan bahkan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini menjadi suatu hal yang penting bagi kualitas pendidikan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) karena dapat berpengaruh pada : 1.) Menurunnya daya saing global yang semakin hari semakin menjadi suatu persaingan yang sangat ketat, sementara perusahaan baik nasional maupun global mencari SDM yang tentunya berkualitas dengan keterampilan baik. Penurunan peserta didik ini dapat menyebabkan banyak individu tidak memiliki suatu keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di pasar kerja global, sehingga daya saing tenaga kerja nasional menurun. 2.) Terjadinya suatu kesenjangan keterampilan (Skill Gap) Dimana Pendidikan formal tentu menyediakan pengetahuan dasar, sementara Pendidikan non-formal bisanya menawarkan keterampilan yang spesifik. Apabila terjadi penurunan peserta didik hal ini dapat memperluas kesenjangan keterampilan, yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan inovasi.

Dalam pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi suatu hal yang digaris bawahi, sebab di era globalisasi ini akan terus mendorong negara-negara untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi hal itu dapat menjadi point penting bagi pendidikan formal maupun non-formal, karena dengan pendidikan yang cukup setiap individu memiliki bekal dalam suatu kerampilan teknologi serta inovasi.

Selanjutnya pendidikan merupakan sarana dalam mengembangkan nilai-nilai sosial dan keterampilan interpersonal yang dapat membantu integrasi sosial (Pare & Sihotang, 2023). Dengan menurunnya jumlah peserta didik, semakin banyak individu yang mungkin kurang terlibat dalam komunitas dan tidak memiliki jaringan sosial yang kuat, sehingga meningkatkan risiko isolasi sosial dan kurangnya suatu integrasi. Dan dampak bagi sistem pendidikan serta lembaga pendidikan itu sendiri berpotensi menghambat reformasi pendidikan dimana di era globalisasi, sistem pendidikan perlu beradaptasi untuk memenuhi standar global.

Melihat hal-hal tersebut meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara adalah hal yang penting dan perlu dilakukan upaya yang tepat, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi dan kemampuan tenaga pengajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pembekalan dan pelatihan yang fokus pada teknologi, seperti pelatihan dasar mengenai penggunaan program-program kantor seperti Microsoft Word, Excel, dan Power Point (Shabur & Amadi, 2023). Dengan era globalisasi pada saat ini memiliki peran yang memiliki dampak besar bagi pendidikan, karena melalui teknologi pendidikan dapat diakses dengan mudah dan praktis, serba cepat sekarang ini telah masuk kedalam sebuah model yang telah terstruktur dalam menilai sesuatu secara keseluruhan kegiatan belajar dan mengajar yang praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif.

Pembangunan sistem pendidikan nasional dalam era globalisasi merupakan proses yang harus terus berlangsung mengingat kesadaran dalam membenahi pendidikan nasional semakin mendesak, maka perlunya kesadaran bahwa pendidikan merupakan suatu komponen penting dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat bagi masa depan bangsa ini. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah,

sekolah, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Setelah membaca pembahasan tersebut, tetap idak menutup kemungkinan bahwa orang yang berpendidikan juga dapat terjerat hukum karena memiliki beberapa faktor risiko yang mungkin kurang disadari atau bahkan diabaikan. Hal tersebut tidak lepas kaitannya dengan penyalahgunaan pengetahuan dan wewenang, tekanan atau ambisi yang berlebihan, kesalahan atau kelalaian dalam proses professional, kepuasan diri dan kurangnya etika, pengaruh lingkungan atau pergaulan, kurangnya pemahaman tentang hukum atau regulasi yang berlaku, dan tuntutan dan persaingan di era globalisasi.

Perkembangan pendidikan yang pesat dan semakin terhubung dengan dinamika globalisasi memang menghadirkan berbagai peluang, namun juga tantangan yang menyebabkan sebagian pihak di lingkungan pendidikan terseret masalah hukum. Faktor-faktor penyebabnya meliputi penggunaan teknologi, perubahan norma, hingga kesenjangan etika.

Berikut adalah beberapa alasan dan contoh kasus di mana pihak dalam pendidikan terlibat masalah hukum :

- 1) Globalisasi membuat teknologi dan internet menjadi bagian integral dalam pendidikan. Sayangnya, memudahkan akses ini terkadang disalahgunakan, seperti untuk penyebaran konten tidak pantas atau pelanggaran hak cipta.
- 2) Dalam era digital, privasi peserta didik, guru, atau orang tua terkadang kurang terlindungi. Pelanggaran privasi atau kebocoran data pribadi dapat menjadi isu hukum yang serius.
- 3) Perubahan sosial akibat globalisasi dapat menimbulkan ketegangan atau ketidakpahaman antarbudaya. Di beberapa kasus, ini menyebabkan diskriminasi, bullying, atau bahkan kekerasan di lingkungan sekolah, yang dapat berujung pada masalah hukum.
- 4) Perubahan sosial akibat globalisasi dapat menimbulkan ketegangan atau ketidakpahaman antarbudaya. Di beberapa kasus, ini menyebabkan diskriminasi, bullying, atau bahkan kekerasan di lingkungan sekolah, yang dapat berujung pada masalah hukum.

Untuk mengurangi kasus-kasus hukum dalam pendidikan haruslah mulai diperhatikan dalam penerapan kebijakan dan regulasinya, lembaga pendidikan perlu mengadopsi standar keamanan data yang sesuai dengan praturan yang berlaku, dalam penggunaan teknologi juga perlu disgi juga perlu distai dengan pemahaman-pemahaman etika digital, termasuk data dan hak cipta, lalu tanggung jawab dalam menggunakan internet, dan lembaga pendidik dapat memberikan perhatian pada suatu program untuk dapat mencegah terjadinya suatu tindakan yang tidak diinginkan atau suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dengan cara mengedukasi peserta didik.

Adapun dampak globalisasi terhadap pendidikan, khususnya dalam hal pergantian kurikulum, dalam UU No.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 19 menyatakan "Kurikulum

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Kurikulum diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah proses pendidikan. Nyatanya, kurikulum sering diubah yang menyebabkan kebingungan di berbagai pihak yang mengakibatkan proses pendidikan menjadi terhambat. Hingga saat ini, perubahan kurikulum di Indonesia sering terjadi. Dimulai dari tahun 1947 hingga tahun 2022. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra, bahkan menimbulkan ungkapan "ganti menteri ganti kurikulum"

Perkembangan kurikulum sangat terasa seiring dengan tuntutan kompetensi global yang terus berkembang. Salah satu dampak dari era globalisasi adalah merombak sistem kurikulum di Indonesia, yang telah mengalami pergantian kurikulum sebanyak 11 kali. Mulai dari kurikulum rencana Pelajaran di tahun 1947 (kurikulum lanjutan yang awalnya digunakan pada masa penjajahan Belanda), kurikulum 1952 (Rentjatna), kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006 (KTSP), kurikulum 2013 (K-13) dan kurikulum 2021 (Kurikulum Merdeka), (Anis Aprianti & Siti Tiara Maulia, 2023). Dengan mengetahui pembaharuan-pembaharuan pergantian kurikulum tersebut, kasus yang dapat ditanda bawahi saat ini yaitu mengenai "Isu ganti kurikulum, Kemendikbud ungkap Nasib kurikulum Merdeka." Merujuk pada situs web Kemendikbud, sudah ada 309.149 sekolah terdaftar sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2023 (A, 2024). Sebanyak 6.200 sekolah di antaranya ada di daerah tertinggal yang menyebabkan terjadinya standarisasi dan distandarisasi yang kaku untuk mencapai efisiensi lalu mengabaikan suatu keberagaman kebutuhan peserta didik, serta komersialisasi pengetahuan dan informasi di komoditas, sehingga akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi terbatas bagi sebagian masyarakat. Dan mengakibatkan kesenjangan dalam sistem pendidikan di Indonesia (Aripin, 2021).

Berdasarkan berita yang beredar saat ini hanya sekitar 27% sekolah atau satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum tersebut (Noprizal, 2024). Kurikulum Merdeka ini memiliki fokus pada materi esensial, fleksibel atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa serta fokus pada penguatan karakter. Namun hal yang menjadi tantangan ketika kurikulum ini ditetapkan adalah penggunaan teknologi (memanfaatkan platform pembelajaran, email, hybrid learning, e-learning, sumber dan media pembelajaran berbasis digital) dan memunculkan pembelajaran terdiferensiasi. Hal ini sangat membutuhkan kesiapan bagi siswa, khususnya guru dalam menyiapkan suatu strategi sebelum berlangsungnya program pembelajaran. Dalam implementasinya, kurikulum ini kurang baik karena telah membebani siswa dan guru, sangat mewart dan mahal. Maka dalam penerapan kurikulum tersebut membutuhkan sarana dan prasarana yang merupakan alat atau pendukung dalam berlangsungnya proses belajar pada era globalisasi ini, sosioalisasi, dukungan pemerintah serta keikutsertaan siswa untuk melangsungkan keberlangsungan kurikulum Merdeka (Fitri, 2021; Subroto et al., 2023).

Guru memiliki peran penting dalam suatu pengembangan kurikulum yang mencakup dalam sebuah penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum yang harus sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan. Selain itu guru juga bertindak sebagai agen

perubahan, yang memiliki tanggung jawab untuk membangun visi pribadi yang kuat dan menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, guru mampu memberikan inspirasi kepada peserta didik melalui nilai-nilai positif, tidak hanya mengajarkan materi akademik saja namun nilai-nilai lain seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas dalam suatu pendekatan pembelajaran yang seimbang. Melalui nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan penting untuk membentuk karakter siswa yang siap menghadapi tantangan global sekaligus tetap berakar pada identitas budaya lokal.

Perubahan kurikulum terhadap proses pembelajaran erat sekali pada performa guru dalam mengajar. Oleh karena itu, penerapan perubahan kurikulum sering kali memunculkan suatu tantangan yang tidak dapat terlepas dari menentukan metode mengajar yang sesuai. Hal inilah yang menjadi dampak pada kinerja guru dan kenyamanan siswa dalam belajar. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum sangatlah bergantung pada kemampuan dan persepsi pendidik dalam memahami serta mengadaptasi perubahan tersebut.

Adapun dalam penggunaan teknologi yang memanfaatkan platform pembelajaran seperti, email, hybrid learning, e-learning, sumber dan media pembelajaran yang berbasis digital dapat memunculkan pembelajaran terdiferensiasi, hal ini sangatlah membutuhkan sarana serta prasarana atau alat pendukung yang memadai dalam berlangsungnya proses belajar. Sarana ini mencakup fasilitas fisik seperti teknologi modern yaitu komputer, handphone, laptop, perangkat pembelajaran digital, koneksi internet yang stabil, serta ruangan yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lain yang dapat menjadi penunjang atau indikator dalam sebuah proses pendidikan.

Selain itu, prasarana pendukung dalam proses pendidikan meliputi, manajemen pembelajaran daring (Learning Management System), alat bantu audiovisual, dan perangkat lunak pendidikan, yang menjadi bahan penting untuk mendukung berlangsungnya proses pendidikan atau pembelajaran yang lebih baik secara interaktif dan inovatif baik bagi siswa maupun guru. Ketersediaan ini memastikan bahwa siswa dan guru dapat mengakses materi pembelajaran secara efektif, sesuai dengan tuntutan globalisasi yang memprioritaskan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi.

Dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangatlah diperlukan untuk memastikan pemerataan akses sarana dan prasarana ini, khususnya di daerah-daerah tertinggal, agar seluruh peserta didik dapat merasakan manfaat dari penerapan kurikulum yang berorientasi pada masa depan. Dengan begitu, hal yang perlu diperhatikan ialah peningkatan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya guna untuk mencapai tujuan yang telah diantisipasi, sesuai dengan ketentuan yang tertera pada UU No.20 Tahun 2003 Bab XII Pasal 45 Ayat 1 menyatakan "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik."

Dengan demikian, kurikulum haruslah dirancang dengan lebih fleksibel agar bisa memenuhi tuntutan globalisasi, terutama dalam pengembangan keterampilan di abad ke-21 yang terus semakin berkembang, seperti dalam kemampuan berpikir kritis, kolaborasi,

keaktivitas, dan literasi digital. Fleksibilitas ini memungkinkan kurikulum untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan dunia kerja global yang terus berkembang. Selain itu, penerapan kurikulum di era globalisasi membutuhkan sinergi antara penyediaan sarana dan prasarana, dukungan pemerintah, partisipasi aktif siswa, serta keterlibatan komunitas pendidikan dalam memastikan implementasi yang efektif.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya pada desain kurikulum, tetapi juga pada stabilitasnya. Perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat menimbulkan kebingungan dan beban tambahan bagi guru dan siswa dalam beradaptasi dengan sistem baru. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan kurikulum didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan peserta didik dan kemampuan pendidik dalam melaksanakannya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang intensif dan pelatihan berkelanjutan bagi guru, sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum baru dan metode pembelajarannya. Selain itu, implementasi kurikulum juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti akses teknologi, ruang belajar yang kondusif, dan materi pembelajaran yang relevan. Pemerintah, melalui program-program seperti merdeka belajar, dapat memberikan dukungan strategis dalam hal ini. Kolaborasi dengan sektor swasta juga bisa menjadi solusi inovatif dalam mempercepat pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil.

Keberlanjutan kurikulum memerlukan pendekatan yang memadukan kebutuhan lokal dan standar global. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya relevan dengan konteks lokal, tetapi juga mampu mempersiapkan peserta didik untuk berkontribusi di tingkat internasional atau jenjang yang lebih luas dan tinggi. Untuk memastikan hal ini, peran evaluasi secara berkala sangat penting dan dibutuhkan, guna untuk bisa menilai efektivitas kurikulum dalam memenuhi tujuan pendidikan nasional sekaligus menjawab tantangan global dengan tetap memperhatikan kebutuhan lokal.

Simpulan

Dampak globalisasi pada sistem pendidikan dari perspektif hukum dan sosiologi. Globalisasi memberikan akses lebih luas terhadap informasi dan pengetahuan melalui teknologi, memungkinkan sistem pendidikan menyesuaikan diri dengan standar internasional dan meningkatkan kesempatan kolaborasi global. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang serta dampak budaya global yang menggeser nilai-nilai lokal. Dari perspektif hukum, diperlukan regulasi untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan kesetaraan akses pendidikan. Dari perspektif sosiologi, globalisasi memengaruhi nilai dan norma dalam pendidikan, menghadirkan tantangan dalam mempertahankan identitas budaya lokal.

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, terutama dalam penggunaan teknologi, untuk mendukung kurikulum berbasis global yang sesuai dengan kebutuhan digital, lalu pembuat kebijakan perlu menyusun

kebijakan pendidikan yang adaptif dan inklusif, yang mempertimbangkan akses merata ke teknologi serta mempertahankan identitas budaya lokal dalam kurikulum serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap tantangan globalisasi tanpa mengesampingkan keunikan lokal dan diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah, khususnya di daerah tertinggal, agar kesenjangan digital dapat diatasi dan akses pendidikan merata.

Daftar Pustaka

- A, D. (2024). *Dukung Prioritas Nasional, Kemendikbudristek Berhasil Tingkatkan Capaian Akses Layanan Pendidikan*. Kemdikbud. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/03/dukung-prioritas-nasional-kemendikbudristek-berhasil-tingkatkan-capaian-akses-layanan-pendidikan>
- Abas, M., Rohman, M., Purnama, W. W., Hetharie, Y., Ramadianto, A. Y., Satria, F., Bagus, M., Hamdan, F. Z. Z., Aggraeni, R., Putri, N. E., Effendy, W., Munir, S., Hadi, M. N., Nurhayati, Prasetyo, M. H., & Ihsan, M. (2023). *Konseptualisasi Epistemologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara* (I. Ritonga (ed.)). Balai Literasi Bangsa. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3297/1/Iskandar_Ritonga_Ilmu_hukum_konseptualisasi_epistemologi_prinsip_hukum_dalam_konstitusi_negara.pdf
- Abdul Karim, Usep Saepul Anwar, & Suherman. (2024). Transformasi Pendidikan Di Era Globalisasi: Integrasi Dan Tantangan Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia. *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management*, 7(2), 602–609.
- Amini, Q., Rizkyah, K., Nuralviah, S., Urfany, N., & Tangerang, U. M. (2020). *Pengaruh globalisasi terhadap siswa sekolah dasar*. 2(September 2020), 375–385.
- Anis Aprianti, & Siti Tiara Maulia. (2023). Kebijakan Pendidikan: Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Bagi Guru Dan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 181–190. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1507>
- Aprillia, E., Nurhayati, C., Putri, A., & Pandiangan, B. (2023). *Perubahan kurikulum pada proses pembelajaran*. I(4). <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.78>
- Aripin, A. (2021). Tantangan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam dan Strategi Pengembangannya dalam Menghadapi Tuntutan Kompetensi Masa Depan. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 121–142. <https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.15222>
- Astomo, P. (2021). Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 172–183. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.172-183>
- Basri, H. (2023). Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Pendidikan: Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 128–143. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.446>
- Firmansyah, Amma, T., & Mudawamah, A. (2023). Dampak Globalisasi dan Tantangannya Terhadap Pendidikan Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 21(1), 43–54. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/1016>
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan*

- Teknologi Indonesia*, 1(4), 1620. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.26>
- Gunawan, R. G., Rozika, E., Rusdinal, Gistituati, N., & Ananda, A. (2024). Studi Komparatif Kurikulum Matematika Sekolah Dasar Indonesia Dan Australia. *Jurnal ...*, 12(1), 401–407. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/5304%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/5304/3192>
- Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724>
- Hermawan, R. (2014). Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Pada Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1–18.
- Juliannisa, I. A., Handayani, T. R., Rahmi, Maulana, R., Ambarwati, D., Ramadhani, R., Jati, P. S., Sholekhah, S. M., M.A, D. B., Haliansyah, H., N, R. B., Rahmah, A. M., Roswita, C., Chairunnisa, C., Nurain, H., Nadhifa, R., Ningsih, E. Y., & Reihana, A. (2022). *Pendidikan & Bela Negara*.
- Kemendikbudristek, D. (2024). *Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Nasional*. Dapokemdikbud. <https://dapo.kemdikbud.go.id/>
- Khudlori, N. (2022). Sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan di era globalisasi. *J-PGMI: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 5(1), 17–22.
- Nanti, S., & Fadriati, F. (2023). Analisis Dampak Globalisasi Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pendidikan di Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 147–154. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i2.9667>
- Noprizal, L. (2024). *Viral Isu Ganti Kurikulum, Kemendikbud Ungkap Nasib Kurikulum Merdeka*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240305160451-192-1070731/viral-isu-ganti-kurikulum-kemendikbud-ungkap-nasib-kurikulum-merdeka>
- Oo, S., Iriantara, Y., & Handayani, S. (2022). Ancaman atau Peluang Globalisasi Pendidikan dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan. *AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-IlmuKeislaman*, 7(1), 14–24.
- Pare, A., & Sihotang, H. (2023). Pendidikan Holistik untuk Mengembangkan Keterampilan Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27778–27787.
- Salim, K. (2014). Pengaruh Globalisasi terhadap Dunia Pendidikan. *University Teknologi Malaysia*, 9(1), 1–11. <https://www.researchgate.net/publication/271205216>
- Salsabila, U. H., Ilmi, M. U., Aisyah, S., Nurfadila, N., & Saputra, R. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Era Disrupsi. *Journal on Education*, 3(01), 104–112. <https://doi.org/10.31004/joe.v3i01.348>
- Sanusi. (2024). *Dinamika Dan Pemecahan Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital* (A. P. Hawari (ed.)). PT Media Penerbit Indonesia.
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). *Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia*. 1, 1–12.
- Shabur, A., & Amadi, M. (2023). *Pendidikan di Era Global : Persiapan Siswa untuk Menghadapi Dunia yang Semakin Kompetitif*. 17(2), 153–164. <https://doi.org/10.29408/edc.v17i2.9439>

-
- Subroto, D. E., Supriandi, Wirawan, R., & Rukmana, A. Y. (2023). Implementasi Teknologi dalam Pembelajaran di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Dunia Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(07), 473–480. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i07.542>
- Wang, C., Zhang, M., Sesunan, A., & Tolanda, L. (2023). Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan di Indonesia. In *Pendidikan* (Vol. 4, Issue 2). <https://static.skm.kemdikbud.go.id/announcements/28942fb9-334d-4fb5-9ce2-56f7ddce4d48-Indonesias-K-12-Education-Quality-Improvement-Bahasa-05122023.pdf>